

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pergantian jabatan publik akan segera diadakan. Rakyat Indonesia akan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan secara serentak di tahun 2024 mendatang. Pemilu 2024 disebut sebagai Pemilu serentak pertama dalam sejarah Indonesia, dimana rakyat akan memilih Calon Presiden (Capres) 2024, Calon Legislatif (Caleg) 2024, dan Calon Kepala Daerah 2024.

Indonesia akan dihadapkan pada kontestasi politik akbar. Semua bakal calon pemimpin akan diadukan dalam kontestasi ini. Melihat banyaknya lowongan bagi pejabat publik, maka pihak partai politik menjadi salah satu yang paling sibuk. Beragam strategi dikeluarkan oleh partai politik supaya dapat menjajakan dirinya dalam kursi-kursi kepemimpinan ini. Entah itu marketing politik, ataupun kaderisasi politik, sebagai langkah mempersiapkan bakal calon pemimpin yang akan mereka usung.

Kaderisasi menjadi salah satu hal yang patut untuk diperhatikan. Melalui hal ini, calon pemimpin dididik dan diarahkan untuk menjadi pemimpin yang berintegritas dan memiliki pemahaman mengenai ideologi partai yang mereka usung. Karena selain dari marketing yang dilakukan oleh partai politik, the power of calon pemimpin menjadi hal lain yang dapat dijual kepada masyarakat. Power ini diperoleh melalui pelatihan terdidik yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri. Kaderisasi menjadi hal yang sangat amat penting. Peralannya, itu akan

memengaruhi ideologi, kepemimpinan, dan kinerja yang dibawa oleh calon pemimpin. Haris, dkk (2016) menyebutkan, kaderisasi menjadi hal yang penting, karena di dalamnya terdapat transfer pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam suatu kajian tertentu.

Kaderisasi sendiri dilakukan untuk meningkatkan kualitas anggota sehingga nantinya mereka (para anggota) mampu menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu berkembang dalam kehidupan politik masyarakat bangsa dan negara, (Romli, 2021). Adapun fungsi kaderisasi dalam partai politik adalah untuk mempersiapkan calon-calon untuk siap menerima dan mengelola partainya ke depan.

Sayangnya, kaderisasi yang dilakukan partai politik di Indonesia belum dilakukan dengan maksimal. Ada beragam persoalan dimana kader partai politik terlibat kasus, seperti korupsi, politik dinasti, dan penjualan jabatan publik. Adapula fenomena kader instan, kader partai 'loncat pagar', yang muncul akibat sistem kaderisasi yang belum maksimal. Semua hal ini terjadi karena, belum melembaganya sistem kaderisasi di hampir semua partai politik di Indonesia. Pola seleksi, penjenjangan, dan pendidikan bagi para anggota kurang dilakukan secara lebih memadai, (Romli, 2021).

Kaderisasi diperlukan untuk mereproduksi pemimpin nasional. Karena kaderisasi merupakan alat untuk memastikan bahwa orang-orang yang terseleksi dalam proses rekrutmen adalah orang yang kompeten atau memiliki loyalitas terhadap partai. UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan, bahwa pengkaderan anggota partai dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik dengan asas Islam-berbasis kader. PKS juga merupakan partai yang telah memiliki sistem kaderisasi yang baku dan berjenjang. Sistem pengkaderan PKS dikategorikan ke dalam tiga kelompok secara ketat, meliputi: (a.) anggota kader pendukung. Anggota kader pendukung terdiri dari anggota pemula dan siaga; (b.) anggota kader penggerak. Anggota kader penggerak terdiri dari anggota muda dan pratama; serta (c.) anggota kader pelopor. Anggota kader pelopor terdiri dari anggota madya, dewasa, dan utama.

Suhawi (2018), PKS mendasarkan dirinya pada Islam. Artinya, Islam bagi PKS bukan semata-mata tuntutan kehidupan personal tetapi kesadaran entitas politik. Dari kebijakan dasar, visi dan misi tampak bahwa PKS meyakini Islam sebagai ajaran sekaligus sistem yang komprehensif, universal, dan final. Berdasarkan sebab inilah PKS selalu mengidentikan diri dengan Islam.

Berbeda halnya dengan PKS sebagai parpol berasaskan Islam. Golkar berawal dari Sekber Golkar dimasa akhir pemerintahan Soekarno. Golkar merupakan partai besar yang mampu bertahan dari perubahan arah politik di Indonesia, dan masih tetap eksis hingga saat ini. Sekber Golkar merupakan wadah dari golongan fungsional yang tidak berada di bawah pengaruh aliran ideologi politik tertentu dan dinakhkodai oleh militer, (Suhawi, 2018).

Suhawi (2018) menyebutkan, sebagai parpol yang tidak berlandaskan kepada salah satu ideologi, Golkar lebih menitikberatkan ke pembangunan/developmentalism, sehingga pelembagaan menjadi kata kunci dalam tata kelola partai. Partai Golkar hendak mewujudkan kehidupan politik nasional

yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan.

Sehubungan dengan keanggotaan, berdasarkan pada AD/ART partai Golkar, ada tiga kelompok anggota dalam partai ini. Ketiga kelompok itu adalah anggota biasa, anggota kehormatan, dan kader. Kader partai Golkar sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu kader pratama, madya dan utama. Adapun pengkaderan yang dilakukan Partai Golkar itu berbeda-beda dalam setiap tingkatannya. Akan tetapi pada kenyataan yang ada di lapangan, anggota partai Golkar selain dari Anggota kehormatan dibedakan menjadi Anggota Biasa dan Kader, tanpa ada tingkatan kader. Lalu untuk proses pengkaderannya pun hanya berlangsung sekali selama orang tersebut terdaftar sebagai anggota partai Golkar.

Penelitian ini akan dilakukan di kota Tasikmalaya. Tasikmalaya dijuluki sebagai kota santri, dengan perolehan kursi di DPR banyak didominasi oleh partai Islam. Ada doktrin secara tidak langsung, dimana masyarakat memilih partai Islam meski mereka tidak tahu siapa calon yang mereka pilih.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Kota Tasikmalaya 2009-2019**

No	Nama Partai Politik	Perolehan Kursi		
		2009	2014	2019
1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8	10	9
2	Partai Demokrat	8	4	2
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	7	5	5
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	5	7	5
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	4	5	5
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4	4	4
7	Partai Bintang Reformasi (PBR)	4	×	×
8	Partai Bulan Bintang (PBB)	3	3	1
9	Partai Kebangkitan Bangsa	1	×	×

10	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	×	×
11	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	×	1	1
12	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	×	2	3
13	Partai Gerindra	×	4	10
Jumlah Perolehan Kursi		45	45	45

(Sumber: KPU Kota Tasikmalaya)

Berdasarkan data dari tabel di atas, PPP selalu memimpin dalam perolehan kursi di kota Tasikmalaya, yang menunjukkan, bahwa partai islam memiliki posisi paling baik di DPRD kota. Adapun perolehan kursi PKS di DPRD kota Tasikmalaya tergolong stabil, dengan tidak ada penurunan dan kenaikan yang cukup berarti, dan begitu halnya dengan Golkar.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pola kaderisasi PKS dan Golkar di kota Tasikmalaya?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian akan membahas mengenai pola kaderisasi yang dilakukan oleh Partai PKS dan Golkar di kota Tasikmalaya. Batasan dalam penelitian ini terletak pada, penjabaran proses kaderisasi yang dilakukan oleh Partai PKS dan Golkar di kota Tasikmalaya kepada para kadernya.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjabarkan proses kaderisasi yang dilakukan PKS dan Golkar di kota Tasikmalaya.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap riset ini akan bermanfaat terutama,

### **1. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, terutama dalam tema politik sub tema partai politik, khususnya mengenai kaderisasi partai politik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjabarkan proses kaderisasi yang dilakukan oleh PKS dan Golkar di kota Tasikmalaya.

### **2. Secara Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan disiplin dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kepartaian dan ilmu politik. Hal ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan ataupun referensi bagi masyarakat umum.